

STRATEGI KESOPANAN BERBAHASA PRESIDEN JOKO WIDODO: POTRET TINDAK TUTUR PENANGANAN MASALAH SOSIAL-POLITIK BANGSA

Burhanuddin¹ dan Sumarlam²

¹FKIP Universitas Mataram, Jalan Majapahit No. 62 Mataram, NTB.

e-mail: burhanuddinali.fkipunram@yahoo.co.id

²Fakultas Ilmu Budaya UNS, Jl. Ir. Sutami No. 36A,

Kentingan, Jebres, Surakarta, e-mail: sumarlamwd@gmail.com

Abstract

This research intends to elaborate the types and domains of President Joko Widodo's speaking politeness strategies in addressing the nation's socio-political issues. The simplified Brown and Levinson's (1987) speaking politeness strategies have been employed to achieve the intended purpose of this investigation. The data was collected through listening method and the extra-lingual equivalent method was employed to analyze the data (Sudaryanto, 1993; Mahsun, 2005). Among the eleven speaking politeness strategies proposed by Brown and Levinson (1987), never has President Joko Widodo employed a joke strategy. It might be because the strategy is thought inappropriate with the topic delivered and is considered as a threat for national socio-political stability. The avoid disagreement strategy and the promise-offer strategy are the most often used strategies by President Joko Widodo, sharing 20% of each; followed by the in-group identity markers strategy and the intensify interest-see agreement strategy, sharing 12% of each; the strategy of notice; attend to interest-wants (2%), and the four remaining strategies which counted for 7% each. The speech acts performed by President Joko Widodo contain some politeness strategies with considerable perlocution power. However, the dominant use of certain strategies is mainly caused by the socio-cultural inferences, which influence the speaker to perform speech acts, rather than the speaker's awareness and consciousness for selecting those strategies. The knowledge of dominant strategies of speaking politeness practiced by President Joko Widodo can be used as a base for understanding the pattern of the president's characteristics to deal with the nation's social and political issues.

Keywords: *speaking politeness strategy, speech act, socio-politic domain*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menjelaskan strategi (jenis dan strategi dominan) kesopanan berbahasa yang digunakan Presiden Joko Widodo dalam merespons persoalan sosial-politik bangsa. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan konsep strategi kesopanan berbahasa Brown dan Levinson (1987) yang telah penulis sederhanakan. Penggunaan teori ini karena tindak tutur ini cenderung mengancam muka (*threatened face*). Secara metodologi, data dikumpulkan menggunakan metode simak dan analisis data menggunakan padan ekstralingual (Sudaryanto, 1993 dan Mahsun, 2005). Dari sebelas strategi kesopanan berbahasa teori Brown dan Levinson (1987), Presiden Joko Widodo tidak pernah menggunakan **strategi membuat lelucon** karena mungkin berkaitan dengan jenis topik dan menyangkut kestabilan sosial-politik masyarakat dan bangsa. Strategi *mengurangi pertentangan* dan *membuat penawaran-janji* merupakan jenis strategi yang sering digunakan, masing-masing 20%; *strategi menunjukkan kesamaan jati diri* dan *strategi meningkatkan rasa simpati-persetujuan* 12%; *strategi memperhatikan minat-keinginan* 2%; dan empat jenis yang lain masing-masing 7%. Tindak tutur Presiden Joko Widodo hampir mengandung beberapa strategi kesopanan, sehingga tindak tutur tersebut mengandung daya perlokusi yang cukup kuat. Penggunaan jenis strategi tertentu lebih dominan, semata-mata bukanlah upaya sadar penutur tetapi merupakan pengaruh lingkungan sosial-budaya yang melingkupi partisipasi dalam tindak tutur. Namun, dominasi penggunaan jenis strategi kesopanan tertentu dapat dijadikan dasar untuk memahami pola karakter seorang kepala negara dalam memecahkan masalah sosial-politik bangsa.

Kata Kunci: *strategi kesopanan berbahasa, tindak tutur, dan sosial-politik*

A. PENDAHULUAN

Sejak menjadi presiden, hampir semua aktivitas hidup sosok seorang Joko Widodo termasuk kegiatan berkomunikasi (yang

dalam tulisan ini selanjutnya disebut *tindak tutur*)¹ oleh masyarakat (tutur) Indonesia tidak lagi dipahami sebagai representasi diri pribadi tetapi sebagai kepala negara yang memiliki “kuasa” atas seluruh masyarakatnya. Tindak tuturnya dianggap representasi sikap pemerintah yang memiliki implikasi perlukosi untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Di satu sisi, tindak tutur mitra tuturnya harus dipahami sebagai tindak tutur masyarakat-bangsa Indonesia meskipun itu direpresentasi oleh individu pewawancara atau institusi media massa tertentu. Apalagi kegiatan berkomunikasi (tindak tutur) tersebut menyangkut atau dalam kerangka merespons permasalahan sosial-politik bangsa yang erat kaitannya dengan kestabilan dan kemaslahatan masyarakat. Kondisi dirinya sebagai penutur, mitra tutur, dan topik itulah kemudian berperan penting memengaruhi Presiden Joko Widodo dalam cara bertindak tutur terutama dalam hal strategi kesopanan berbahasa. Kondisi seperti itu sekaligus cenderung akan menempatkan Presiden Jokowi sebagai penutur pada posisi yang kurang menguntungkan atau dalam terminologi pragmatik (kesopanan berbahasa) Brown dan Levinson (1987) disebut *tindak tutur mengancam muka* (*threatened face*). Dalam situasi demikian, oleh Brown dan Levinson (1987) penutur akan menerapkan strategi kesopanan berbahasa, misalnya, menghindari pertentangan, meningkatkan perhatian/simpati, mengidentifikasi diri sama dengan mitra tutur, dan sebagainya.

Di sisi lain, adanya realitas munculnya berbagai persoalan penting bangsa pada awal pemerintahannya terutama menyangkut sosial-politik menuntut untuk direspons secara tepat dan cepat. Persoalan-persoalan sosial-politik yang dimaksud, misalnya *perseteruan KMP-KIH, dualisme DPR, kenaikan harga BBM, perseteruan Polri-KPK, dualisme Parpol PPP-Golkar dan intervensi pemerintah, hingga resuffle kabinet*. Apabila dicermati jenis

¹ Digunakan istilah *tindak tutur* karena aspek pengkajian tulisan ini difokuskan dan atau termasuk dalam bidang ilmu pragmatik, sekaligus untuk membedakan dengan istilah yang terdapat dalam ilmu komunikasi.

permasalahan yang dihadapi, kekurangcermatan pemerintah dalam merespons yang terepresentasi melalui tindak tutur yang notabene memiliki dimensi perlukosi, tidak hanya akan meningkatkan konflik horizontal pada tingkat elit, tetapi juga vertikal (pemerintah dengan masyarakat) yang pada gilirannya akan terjadi ketidakstabilan pada semua aspek kehidupan dan macetnya roda pemerintahan. Kekurangcermatan dalam bertindak tutur Presiden Joko Widodo akan dapat merenggangkan hubungan dan hilangnya dukungan dari partai-partai pendukung dalam pemilihan presiden 2014, misalnya, dalam hal permasalahan Polri VS KPK. Dengan kata lain, kekurangcermatan tindak tutur dalam merespon permasalahan sosial-politik dapat melebarkan jarak antarelemen bangsa. Dalam konteks itu, peran strategi tindak tutur kesopanan berbahasa menjadi sangat penting karena di satu sisi dapat menjadi perekat dan perenggang/pemisah di sisi yang lain bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak tutur (elemen bangsa).

Meskipun beberapa permasalahan sosial-politik bangsa masih menyisakan persoalan tetapi beberapa di antaranya dapat dilalui dan ditangani. Tindak tutur (ilokusi) merupakan wadah awal lahirnya suatu "tindakan/kebijakan" (perlokusi) dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial-politik bangsa sehingga berpengaruh penting terhadap bentuk strategi tindak tutur Presiden Joko Widodo sebagai salah satu peserta tutur. Sebab, dalam situasi yang kurang menguntungkan seperti itu, dirinya sebagai seorang penutur oleh Brown dan Levinson (1987) sedemikian rupa akan cenderung melakukan strategi penyelamatan muka dalam bertindak tutur yang pada gilirannya akan menerapkan strategi kesopanan berbahasa. Bagaimana strategi kesopanan berbahasa yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam merespons berbagai permasalahan sosial-politik bangsa menjadi penting untuk dikaji. Di samping itu, apabila dicermati jenis masalah yang ingin dipecahkan, kajian ini termasuk dalam ilmu bahasa khususnya pragmatik yang notabene pergulatannya cenderung berorientasi pada

pendeskripsian peristiwa komunikasi yang pemanfaatannya selama ini jauh dari hal-hal yang bersifat praktis. Maksudnya adalah jauh dari upaya bagaimana hasil-hasil kajiannya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai kehidupan riil masyarakat. Kajian pragmatik yang dilakukan selama ini lebih banyak bersifat mikro dengan tujuan misalnya mengidentifikasi jenis tindak tutur, presuposisi, prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, dan sebagainya. Untuk mengisi kerumpangan itulah juga topik ini ditulis.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ingin dipecahkan dalam kajian ini adalah bagaimana penggunaan (jenis dan kecenderungan) strategi kesopanan berbahasa Presiden Joko Widodo dalam tindak tutur menangani masalah sosial-politik bangsa?

Sesuai permasalahan yang ingin dipecahkan, setidaknya ada dua variabel yang patut dijelaskan, yaitu strategi kesopanan berbahasa dalam studi pragmatik dan konsep sosial-politik. Sebelum kedua variabel dipaparkan akan dilakukan tinjauan ringkas terhadap beberapa literatur yang relevan guna mengetahui posisi dan orisinalitas kajian ini. Yang terakhir, pemaparan kerangka metodologis, yang menyangkut jenis metode yang digunakan baik dalam pengumpulan data maupun analisis data. Jadi, pada bagian ini ada tiga hal yang akan diuraikan secara berturut-turut, yaitu (1) tinjauan ringkas terhadap berbagai kepustakaan relevan mutakhir; (2) kerangka teoritis; dan (3) kerangka metodologis.

Hasil penelusuran beberapa literatur yang dapat dijangkau bertalian dengan kajian ini khususnya yang mengambil objek bahasa Indonesia, ditemukan beberapa literatur. Yaitu, kajian Gunarwan (1992 & 2007); Rahardi (2006 & 2009); serta Pranowo (2008 & 2009). Gunarwan (1992 & 2007) mengkaji "Persepsi Kesantunan Direktif di dalam Bahasa Indonesia di antara Beberapa Etnik di Jakarta" dan "Implikatur dan Kesantunan Berbahasa: Beberapa Tilikan dari Sandiwara Ludruk"; Rahardi (2006 dan 2009) mengkaji *Pragmatik: Kesantunan Imperatif dalam*

Bahasa Indonesia dan Sosiopragmatik: Kajian Imperatif dalam Wadah Konteks Sosiokultural dan Konteks Situasionalnya; serta Pranowo (2008 & 2009) mengkaji “Kesantunan dalam Pemakaian Bahasa Indonesia” dan *Berbahasa secara Santun*. Apabila dilihat dari aspek dan objek yang dikaji, kajian-kajian tersebut berbeda dengan kajian ini tetapi bersinggungan dalam hal kesopanan. Namun demikian, bahasan terhadap kesopanan tulisan ini lebih difokuskan dalam hal strategi kesopanan (positif) bukan secara umum seperti yang dikaji oleh ketiga linguist di atas.

Kaitan dengan fokus kajian ini, dalam studi pragmatik terdapat istilah *kesopanan* dan atau *kesantunan* yang dalam tulisan ini tidak dipertentangkan satu sama lain, tetapi diperlakukan seperti fungsi pemarkah jalan raya (pada jalur dua arah) yang dibatasi oleh garis putus-putus pada situasi tempat suatu kendaraan bergerak ke satu arah tertentu tanpa ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan. Penggunaan kata *strategi* dalam terminologi *strategi kesopanan berbahasa* tidak selalu mengandung arti usaha sadar untuk berperilaku sopan, tetapi dapat juga merujuk pada ungkapan berbahasa yang bersifat rutin serta mengacu pada upaya berbicara secara sopan (Brown dan Levinson, 1987 cf Pranowo, 2005). Mereduksi konsep dari berbagai pakar pragmatik (Leech, 1983; Brown dan Levinson, 1987; Fraser, 1990; Grice, 2000; Pranowo, 2009; dan Putrayasa, 2014) *kesopanan* dalam kajian ini mengacu pada perilaku sedemikian rupa yang sesuai dengan kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat dan dengan menunjukkan kepedulian dan kepekaan terhadap perasaan orang lain.

Hal kedua berkaitan dengan konsep daya ilokusi. Sumbangan terbesar Austin dalam teori tindak tutur adalah pembedaan tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Menurut Austin (1962), mengucapkan sesuatu adalah melakukan sesuatu dan bahasa atau tutur dapat dipakai untuk membuat kejadian karena kebanyakan ujaran merupakan tindak tutur yang mempunyai daya-daya. Daya-daya tersebut terangkum dalam tiga tindakan secara bersamaan, yaitu tindak lokusi (locutionary acts), tindak

ilokusi (*illocutionary acts*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary acts*). Daya lokusi suatu ujaran adalah makna dasar dan rerefensi dari ujaran yang dihasilkan sedangkan daya ilokusi adalah daya yang ditimbulkan oleh penggunaannya sebagai perintah, ejekan, keluhan, janji, pujian dan sebagainya. Daya lokusi suatu ujaran merupakan makna dasar dan referensi dari ujaran yang dihasilkan, sedangkan daya ilokusi adalah suatu daya yang dituturkan penggunaannya sebagai bentuk perintah, ejekan, keluhan, melarang, janji, pujian, dan sebagainya. Dengan sendirinya, daya ilokusi tersebut merupakan fungsi tindak tutur yang terintegrasi secara terpadu dalam tuturan.

Kaitan dengan strategi kesopanan berbahasa, Lakoff (1973), Leech (1983), Brown dan Levinson (1987), Fraser (1990), Grice (2000), dan Pranowo (2009) memiliki pandangan yang berbeda. Lakoff (1973) berpendapat strategi kesopanan berbahasa berkaitan dengan tiga hal, yaitu (1) formalitas, yaitu peserta tutur yang terlibat harus merasa benar-benar nyaman dalam keseluruhan tindak tutur; (2) ketidaktegasan, yaitu antara peserta tutur saling merasa nyaman dan memiliki banyak pilihan untuk bertutur; dan (3) kesamaan/kesekawanan, yaitu peserta tutur harus menganggap mitra tutur benar-benar sebagai temannya selama bertutur. Menurut Leech (1983) kesopanan berbahasa berkenaan dengan hubungan antara penutur dan mitra tutur, yang dapat dilakukan dengan cara (1) membuat keuntungan orang lain maksimal dan membuat kerugian mitra tutur seminimal mungkin; (2) membuat keuntungan diri sendiri sekecil mungkin dan membuat kerugian diri sendiri sebesar mungkin; (3) mengecam orang lain sedikit mungkin dan memuji orang lain sebanyak mungkin; (4) memuji diri sendiri sedikit mungkin dan mengecam diri sendiri sebanyak mungkin; (5) membuat ketidaksepakatan sedikit mungkin dan kesepakatan sebanyak mungkin; dan (6) mengurangi rasa antipasti sekecil mungkin dan meningkatkan rasa simpati sebanyak mungkin. Grice (2000) berpendapat bahwa kesopanan berbahasa ditandai oleh beberapa hal, yaitu (1) penutur mampu menjaga martabat mitra tutur (tidak

dipermalukan); (2) penutur tidak mengatakan yang kurang baik tentang mitra tutur; (3) penutur tidak mengungkapkan rasa senang atas kemalangan mitra tutur; (4) penutur tidak boleh menyatakan ketidaksetujuan terhadap mitra tutur sehingga merasa jatuh harga dirinya; dan (5) penutur tidak boleh memuji diri sendiri. Pranowo (2009) menegaskan bahwa kesopanan berbahasa dapat dilakukan dengan enam cara: (1) rendah hati; (2) rasa hormat; (3) kethus; (4) menyindir; (5) nada senang; dan (6) nada prihatin.

Brown dan Levinson (1987) secara spesifik mengemukakan strategi kesopanan berbahasa yang dikenal dengan “penyelamatan muka” (*face-saving*), yaitu aktivitas tindak tutur sebagai sebuah kegiatan rasional yang mengandung maksud dan sifat tertentu sebagai manifestasi penghargaan atau penghormatan terhadap individu anggota masyarakat. Strategi kesopanan berbahasa *face-saving* mencakup dua aspek yang saling berkaitan, yaitu (a) *muka negatif*, yaitu keinginan penutur untuk bebas bertindak/melakukan sesuatu; (b) *muka positif*, yaitu keinginan penutur agar dia dapat diterima atau disenangi oleh pihak lain. Lebih jauh, Brown dan Levinson (1987) mengatakan bila penutur selalu berada dalam keadaan terancam (*face-threatened*) diperlukan penyelamatan yang dapat dilakukan melalui penghindaran dari tindakan hingga penyamaran dalam bertutur. Seandainya seorang pelaku tidak sepenuhnya mau dianggap bertanggung jawab dalam suatu tindakan maka yang bersangkutan dapat membuat tuturan yang dapat diinterpretasikan sehingga dirinya tidak dianggap bertanggung jawab sepenuh atas maksud yang terkandung dalam tuturan. Hal ini oleh Brown dan Levinson (1987) disebut tindakan penyelamatan muka (*redressive action*), yaitu menangkalkan rasa kurang senang mitra tutur akibat tindakan yang kurang menyenangkan dengan cara melakukan perubahan tuturan sedemikian rupa sehingga mitra tutur mengetahui bahwa tindak tuturnya kurang dikehendaki oleh penutur. Tujuan *redressive action* ini adalah untuk menjaga kelangsungan hubungan yang

harmonis dengan mitra tutur –atau tindakan kesopanan yang ditujukan untuk mengurangi akibat yang tidak menyenangkan terhadap muka mitra tutur baik muka positif maupun muka negatif. Oleh Brown dan Levinson (1987) kesopanan yang ditujukan untuk muka positif lawan tutur disebut kesopanan positif (*positive politeness*) sedangkan untuk muka negatif disebut kesopanan negatif (*negative politeness*). Sesuai pokok masalah kajian ini, teori strategi kesopanan positiflah yang akan dibahas lebih jauh. Sebab, kesopanan positif ditujukan terhadap muka positif (citra positif) lawan tutur. Kesopanan positif merupakan pendekatan yang menorehkan kesan pada muka lawan tutur bahwa pada hal-hal tertentu penutur juga mempunyai keinginan yang sama dengan lawan tutur. Dengan demikian, istilah *strategi kesopanan berbahasa* yang menjadi judul tulisan ini mengacu pada konsep kesopanan positif Brown dan Levinson (1987).

Untuk mengurangi kekecewaan lawan tutur, Brown dan Levinson (1987) menawarkan lima belas strategi tindakan kepada lawan tutur. Yaitu, (1) memperhatikan minat, keinginan, kelakuan, atau barang, misalnya *Wah, baru saja potong rambut ya... Omong-omong saya datang untuk meminjam sedikit tepung terigu*; (2) melebihkan rasa ketertarikan, persetujuan, simpati, misalnya *Kebun Anda betul-betul luar biasa bagusnya*; (3) meningkatkan rasa tertarik, misalnya *Betul kan?* atau *Tahu maksud saya kan?*; (4) menunjukkan kesamaan jati diri/kelompok, misalnya *Bantu saya membawa tas ini ya nak?*; (5) mengusahakan persetujuan, misalnya, *Masya Allah bannya kempes* atau *Dalam perjalanan pulang ban saya kempes*; (6) menghindari pertentangan, misalnya *Ya, memang kecil, tapi sebenarnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar*; (7) mempresuposisi persepsi sejumlah persamaan penutur, misalnya *Oh luka ini sakit sekali, ma* atau *Ya sayang, memang sakit sekali, saya tahu*; (8) membuat lelucon, misalnya *Tidak masalah kan kalau kue itu saya habisi saja*; (9) mempresuposisikan bahwa penutur memahami keinginan lawan tutur, misalnya *Ya saya tahu kamu tidak suka pesta, tetapi pesta ini baik untukmu, datanglah*; (10) membuat penawaran dan janji, misalnya *Saya akan singgah kapan-kapan minggu depan*;

(11) menunjukkan rasa optimisme, misalnya *Ke depan masyarakat akan memiliki penegak hukum yang lebih baik*; (12) berusaha melibatkan mitra tutur dalam suatu kegiatan tertentu, misalnya *Kalau begitu, mari kita makan kue*; (13) memberikan dan meminta alasan, misalnya *Bagaimana kalau saya bantu bawa barang anda?*; (14) menawarkan suatu tindakan timbal balik, yaitu kalau lawan tutur melakukan X maka penutur melakukan tindakan Y, misalnya *Kalau kamu mau pinjam bukuku, saya pinjam tugasmu*; dan (15) memberikan rasa simpati kepada lawan tutur, misalnya: *Beritahu saya ya kalau ada yang bisa yang lakukan untuk anda*.

Apabila dicermati pandangan keenam pakar di atas, pandangan Brown dan Levinson (1987)-lah yang akan digunakan dalam kajian ini. Penggunaan strategi kesopanan berbahasa Brown dan Levinson (1987) ini didasarkan pada pertimbangan, yaitu kesesuaian teori tersebut dengan karakteristik data yang akan dianalisis terutama dalam hal topik dialog, yaitu menyangkut masalah sosial-politik yang cenderung “mengancam muka penutur”. Di samping itu, teori Brown dan Levinson (1987) lebih spesifik misalnya dibandingkan teori Leech (1983) yang biasa digunakan analisis percakapan secara umum terutama percakapan sehari-hari yang bersifat alamiah. Namun demikian, dalam kajian ini strategi kesopanan berbahasa Brown dan Levinson (1987) disederhanakan menjadi 11 mengingat dalam realisasinya sulit dibedakan karena mengandung maksud yang sangat mirip. Strategi yang dimaksud adalah strategi 2, strategi 3, strategi 5, dan strategi 15 dirampatkan menjadi suatu strategi yang disebut strategi meningkatkan dan memberikan rasa ketertarikan, persetujuan, dan simpati.

Adapun konsep sosial-politik dalam tulisan ini mengacu aspek kehidupan yang menyangkut (kemaslahatan) masyarakat (umum), serta urusan dan tindakan/kebijakan mengenai pemerintahan termasuk kebijakan dalam menangani suatu masalah.

Secara metodologis, data dikumpulkan dengan metode simak (Sudaryanto, 1993 cf. Mahsun, 2005). Data hasil

penyimpanan/dokumentasi tersebut dikumpulkan dari berbagai media elektronik, yaitu *MNC Media.com*, *Newnasional.com*, *Okezone.com* berupa dialog hasil wawancara dengan Presiden Joko Widodo tentang masalah sosial-politik bangsa sejak ia menjadi Presiden hingga sekarang. Dari hasil pengumpulan data, setidaknya ada beberapa topik dialog yang dijadikan sampel penelitian, yaitu *Kisruh Polri-KPK*, *Dualisme Partai Politik PPP dan Golkar*, *Perseteteruan KMP dan KIH*, *Resuffle Kabinet*, dan *Pengangkatan Panglima TNI*. Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode padan ekstralingual dengan teknik hubung-banding (Mahsun, 2005), yaitu menghubungkan-bandingkan tindak tutur Presiden Joko Widodo dengan konsep strategi kesopanan berbahasa Brown dan Levinson (1987) untuk dilakukan reduksi, organisasi, dan interpretasi sesuai hukum dalam penelitian kualitatif. Selain itu, untuk mengetahui jenis strategi kesopanan berbahasa yang dominan dilakukan kuantifikasi sederhana. Jadi, perhitungan dominasi dilakukan berdasarkan frekuensi penggunaan masing-masing jenis strategi kesopanan yang digunakan dibagi jenis strategi yang muncul secara keseluruhan.

B. STRATEGI KESOPANAN BERBAHASA PRESIDEN JOKO WIDODO

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan beberapa strategi kesopanan berbahasa Presiden Joko Widodo dalam merespons permasalahan sosial politik bangsa sejak menjadi presiden. Beberapa strategi kesopanan berbahasa tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Strategi Menghindari Pertentangan dengan Mitra Tutur

Strategi ini digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggapi permasalahan sosial politik: (a) *kisruh PPK dan Golkar* pada data (1.1 dan 1.2); (b) *KMP VS KIH* (data 1.7); (c) *DPR VS Pemerintah* (data 1.3, 1.4, dan 1.5); serta (d) *Kisruh KPK*

dan Polri (data 1.6). Dari data ditemukan tindak tutur jenis ini seperti di bawah ini.

- (1.1) "*Eenggak ada*, intervensi apa? Persoalan itu ada di partai masing-masing".
- (1.2) "*Tidak ada persoalan*, Menkumham tidak ikutan, mengeluarkan surat apa. Yang kita ingin semua partai bisa bersatu berpikir untuk bangsa untuk rakyat. Jangan menarik-narik pemerintah untuk partai".
- (1.3) "Dulu DPR kan masih ribut, sehingga kalau datang bisa keliru, kita tunggu dulu DPR-nya selesai. Sekarang kan ke DPR terus untuk rapat. *Dulu juga tidak dilarang kok*, siapa yang melarang".
- (1.4) "Kita dengan pimpinan DPR *sering ketemu*. Artinya, berbincang dalam rangka politik kebangsaan. Saya meyakini beliau-beliau di dewan berpikir seperti ini. *Sekarang saya tidak ada masalah*. Pembahasan APBN tiap hari di komisi Banggar. Sekarang ini Alhamdulillah sangat senang karena hubungan kita sangat baik".
- (1.5) "Kegiatan eksekutif sekarang sudah *eenggak keliatan ada gesekan*. Artinya, semua partai sudah cair, bekerja tentu saja di dewan budgeting, pengawasan, komunikasinya sangat baik".
- (1.6) "*Belum sampai pada presur*. Ini adalah tim konsultasi tukar pikiran. Kita putuskan sesuai koridor hukum yang ada. Jangan sampai salah dan keliru memutuskan".
- (1.7) "Sekarang sudah berpikir untuk negara. *Tidak ada pikiran KIH-KMP*, ke depan kita sudah harus berjalan untuk negara dan prorakyat".
- (1.8) "Ya itu urusan internallah".

Apabila dicermati, untuk menghindari pertentangan dengan mitra tutur, presiden Joko Widodo melakukan dengan dua cara, yaitu secara eksplisit (melalui kata tertentu) dan implisit (tanpa kata tertentu) tetapi keduanya sama-sama mengandung daya ilokusi (*illocutionary force*). Strategi menghindari pertentangan secara eksplisit dilakukan misalnya dengan cara: *Eenggak ada, intervensi apa? ...* (data 1.1); *Tidak ada persoalan ...* (data 1.2); *Dulu juga tidak dilarang kok, siapa yang melarang* (data 1.3); *Kita dengan pimpinan DPR sering ketemu dan ... sekarang saya tidak ada*

masalah ... (data 1.4); Belum ada sampai presur.... (data 1.6); Tidak ada pikiran KIH-KMP (data 1.7); dan ... sekarang saya tidak ada masalah (data 1.9). Data (1.8) meskipun tidak memiliki penanda ilokusi eksplisit, tetapi tuturan tersebut mengimplisitkan tindak tutur yang lebih netral, tidak beresiko, dan menghindari pertentangan. Selain tuturan tersebut Presiden Joko Widodo memungkinkan membuat dua jenis tuturan, yaitu (1) tuturan 'tidak melakukan reshuffle' yang berarti mengandung daya ilokusi mencitrakan diri negatif dan (2) menyebut nama-nama calon kabinet yang tentunya dapat mengandung daya ilokusi citra negatif atau juga citra positif.

2. Strategi Menunjukkan Kesamaan Jati Diri atau Kelompok

Untuk mengurangi kekecewaan mitra tutur dan mengurangi ketegangan sosial-politik, presiden Joko Widodo menggunakan strategi menunjukkan kesamaan jati diri/kelompok dengan mitra tutur. Strategi ini digunakan dalam merespons permasalahan, yaitu dalam (a) DPR dan Pemerintah (data 2.1); (b) kisruh Polri dan KPK (data 2.3 dan 2.5); dan (c) persetujuan KMP dan KIH (data 2.2 dan 2.4).

- (2.1) "Kita dengan pimpinan DPR sering ketemu. Artinya, berbincang dalam rangka politik kebangsaan. Saya meyakini beliau-beliau di dewan *berpikir seperti ini*. Sekarang saya tidak ada masalah. Pembahasan APBN tiap hari di komisi, Banggar. Sekarang ini Alhamdulillah sangat senang karena hubungan kita sangat baik".
- (2.2) "*Sekarang sudah berpikir untuk negara*. Tidak ada pikiran KIH-KMP, ke depan *kita* sudah harus berjalan untuk negara dan prorakyat".
- (2.3) "*Jangan ada kriminalisasi*, jangan ada yang di atas hukum. Polri dan KPK harus sesuai koridor hukum yang ada".
- (2.4) "Pak Prabowo **kawan baik saya** sudah lama, jadi kalau sudah sebulan dua bulan enggak ketemu tuh kangen".
- (2.5) Saya, **kita berdua** sama agar lembaga penegakan hukum MA, kejaksaan, kepolisian, KPK, betul-betul pada jalur masing-masing. Semuanya harus

diselamatkan untuk menjaga kewibawaan hukum kita”.

Pada kelima tindak tutur tersebut, terdapat beberapa kata yang memiliki daya ilokusi yang digunakan Presiden Joko Widodo untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian/sama dari/dengan mitra tutur atau sebaliknya mitra tutur diidentifikasi menjadi bagian/sama dari/dengan dirinya, yaitu ...*berpikir seperti ini...* (data 2.1); ... *Sekarang sudah berpikir untuk Negara ...* (data 2.2); *Jangan ada kriminalisasi* (data 2.3); dan *Prabowo kawan baik saya ...* (data 2.4). Meskipun pada data (2.3) misalnya terdapat tindak tutur, ... *jangan ada yang di atas hukum....* yang sebenarnya memiliki daya ilokusi menyudutkan KPK, tindak tutur (2.3) Presiden Joko Widodo memiliki daya ilokusi yang mengesankan sama dengan pendapat mitra tutur, *Jangan ada kriminalisasi....* Selain itu, penggunaan pronominal tertentu, seperti *kita pada kita berdua* pada data 2.5, begitu juga pronomia *kita* pada data 2.2 digunakan untuk menunjukkan kesamaan jati diri/kelompok.

3. Strategi Meningkatkan atau Memberikan Rasa Ketertarikan, Persetujuan, dan Simpati

Strategi meningkatkan, memberikan, melebihkan, mengusahakan rasa ketertarikan, persetujuan, dan simpati kepada mitra tutur dilakukan Presiden Joko Widodo dalam merespon permasalahan: (a) DPR dan Pemerintah (data 3.1, 3.2, 3.3); dan (b) persetujuan KMP dan KIH (data 3.4 dan 3.5), seperti di bawah ini.

- (3.1) “Dulu DPR kan masih ribut, sehingga kalau datang bisa keliru, kita tunggu dulu DPR-nya selesai. *Sekarang kan ke DPR terus untuk rapat. Dulu juga tidak dilarang kok, siapa yang melarang?*”
- (3.2) “*Kita dengan pimpinan DPR sering ketemu. Artinya, berbincang dalam rangka politik kebangsaan. Saya meyakini beliau-beliau di dewan berpikir seperti ini. Sekarang saya tidak ada masalah. Pembahasan APBN tiap hari di komisi, Banggar. Sekarang ini Alhamdulillah sangat senang karena hubungan kita sangat baik.*”
- (3.3) “Kegiatan eksekutif sekarang sudah enggak keliatan ada gesekan. Artinya semua partai sudah cair, bekerja

tentu saja di dewan budgeting, pengawasan, *komunikasinya sangat baik*".

- (3.4) "Sekarang sudah berpikir untuk negara. *Tidak ada pikiran KIH-KMP*, ke depan kita sudah harus berjalan untuk negara dan prorakyat".
- (3.5) "**Pak Prabowo kawan baik saya sudah lama**, jadi kalau sudah **sebulan dua bulan enggak ketemu tuh kangen**".

Bentuk-bentuk tuturan yang secara spesifik memiliki daya ilokusi yang memperlihatkan ketertarikan, persetujuan, dan simpati Presiden Joko Widodo kepada mitra tutur misalnya *sekarang kan ke DPR terus untuk rapat...; kita dengan pimpinan DPR sering ketemu...; berbincang* (menandai suasana akrab); *... beliau-beliau ; sekarang ini alhamdulillah sangat senang karena hubungan kita sangat baik; ...komunikasinya sangat baik; Tidak ada pikiran KIH-KMP...; Pak Prabowo kawan baik saya sudah lama; dan sebulan dua bulan enggak ketemu tuh kangen.*

4. Strategi Membuat Penawaran dan Janji

Untuk menghindari pertentangan sekaligus menarik simpati, Presiden Joko Widodo juga menggunakan strategi membuat penawaran dan janji, misalnya dalam merespons permasalahan (a) jabatan panglima TNI (data 4.1); (b) kisruh Polri dan KPK (data 4.2, 4.4 – 4.8); (c) persetujuan KMP-KIH (data 4.3).

- (4.1) "*Ini masih dalam proses.*"
- (4.2) "Belum sampai pada presur. Ini adalah tim konsultasi tukar pikiran. *Kita putuskan sesuai koridor hukum yang ada jangan sampai salah dan keliru memutuskan*".
- (4.3) "*Sekarang sudah berpikir untuk negara.* Tidak ada pikiran KIH-KMP, *ke depan kita sudah harus berjalan untuk negara dan prorakyat*".
- (4.4) "*Ini baru awal. Ke depan* dalam rangka pemberantasan korupsi, *sistemnya harus dibangun*, misalnya perizinan yang cepat, sehingga tak dimainkan untuk tawar-menawar, dan dengan sistem pelayanan satu pintu itu mempercepat berikan layanan yang baik tanpa ada transaksi".
- (4.5) "Tidak hanya KPK. Kejaksaan, Polri, dan KPK semuanya satu semangat sama yang ini kita dorong.

Jadi tidak hanya KPK sendiri, Polri sendiri, ini terintegrasi. Jadi, *kita punya pembersih tindak pidana korupsi*".

(4.6) "Jangan ada kriminalisasi, jangan ada yang di atas hukum. *Polri dan KPK harus sesuai koridor hukum yang ada*".

(4.7) "*Masih punya waktu untuk pembenahan*".

(4.8) "Seleksi jabatan di Polri, tahapan ini belum dimulai karena ada peristiwa ini. Saya bersyukur ini terjadi di awal, jadi *kegiatan semuanya bisa segera diperbaiki*".

Strategi membuat penawaran dan janji pada ketujuh tindak tutur di atas diperlihatkan oleh penggunaan konstruksi yang dicetak miring tebal. Hanya saja konstruksi data (4.5) dan (4.6) cenderung membuat penawaran sedangkan yang lain berupa janji yang juga mengandung ilokusi penawaran.

5. Strategi Memberikan dan Meminta Alasan

Hasil identifikasi ditemukan tindak tutur Presiden Joko Widodo yang mengandung strategi memberikan dan meminta alasan, yaitu dalam merespon masalah (a) DPR dan Pemerintah (data 5.1) dan (b) Perseteruan Polri dan KPK (data 5.2).

(5.1) "Dulu DPR kan masih ribut, sehingga kalau datang bisa keliru, kita tunggu dulu DPR-nya selesai. Sekarang kan ke DPR terus untuk rapat. Dulu juga *tidak dilarang kok, siapa yang melarang?*"

(5.2) "*Ya masuk ke KPK untuk apa?* Di sana ada proses hukum, jangan ada intervensi lho".

Strategi memberikan dan meminta alasan melalui konstruksi: "... tidak dilarang kok, siapa yang melarang?" pada data (5.1), dan "Ya masuk ke KPK untuk apa?" pada data 5.2, digunakan sebagai strategi untuk mengurangi tindakan citra negatif yang dipersepsikan tindak tutur melalui penghindaran ancaman muka.

6. Strategi Berusaha Melibatkan Mitra Tutur dalam suatu Kegiatan Tertentu

Tindak tutur Presiden Joko Widodo juga mengandung ilokusi yang berusaha melibatkan mitra tutur dalam suatu kegiatan

tertentu, yaitu dalam merespons masalah (a) hubungan DPR dan Pemerintah (data 6.1) dan (b) persetujuan KMP-KIH (data 6.2 dan 6.3), seperti data di bawah ini.

- (6.1) "*Kita* dengan pimpinan DPR sering ketemu. Artinya berbincang dalam rangka politik kebangsaan. *Saya meyakini beliau-beliau di dewan berpikir seperti ini*. Sekarang saya tidak ada masalah. Pembahasan APBN tiap hari di komisi, Banggar. Sekarang ini Alhamdulillah sangat senang karena hubungan kita sangat baik".
- (6.2) "*Sekarang sudah berpikir untuk negara*. Tidak ada pikiran KIH-KMP, ke depan kita sudah harus berjalan untuk negara dan prorakyat".
- (6.3) "Saya, *kita berdua sama* agar lembaga penegakan hukum MA, kejaksaan, kepolisian, KPK, betul-betul pada jalur masing-masing. Semuanya harus diselamatkan untuk menjaga kewibawaan hukum kita".

Presiden Joko Widodo berusaha melibatkan mitra tuturnya dalam tindakan tertentu yang tercermin pada ketiga tindak tutur di atas terutama penggunaan konstruksi *kita ... dan konstruksi Saya meyakini beliau-beliau di dewan berpikir seperti ini* pada data (6.1); *sekarang sudah berpikir untuk negara* (terjadi pelepasan pelaku/mitra tutur, yaitu KMP dan juga KIH) pada data (6.2); serta konstruksi *kita berdua sama agar lembaga* pada data (6.3).

7. Strategi Menawarkan suatu Tindakan Timbal Balik

Strategi menawarkan suatu tindakan timbal balik, yaitu kalau lawan tutur melakukan X, maka penutur melakukan tindakan Y. Tindak tutur yang mengandung daya ilokusi ini digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan citra negatif mitra tutur dengan menunjukkan citra positif dirinya, yaitu dalam merespon permasalahan (a) kisruh Polri dan KPK (data 7.1 dan 7.2) dan (b) persetujuan KMP dan KIH (data 7.3), seperti data di bawah ini.

- (7.1) "Ya masuk ke KPK untuk apa? Di sana ada proses hukum, jangan ada intervensi lho".

(7.2) “Belum sampai pada presur. Ini adalah tim konsultasi tukar pikiran. Kita putuskan sesuai koridor hukum yang ada jangan sampai salah dan keliru memutuskan”.

(7.3) “Sekarang sudah berpikir untuk negara. Tidak ada pikiran KIH-KMP, ke depan kita sudah harus berjalan untuk negara dan prorakyat”.

Pada tindak tutur (7.1) sebenarnya mitra tuturnya mengatakan bahwa “Tim 9 perlu melakukan penyelidikan (masuk) ke Polri dan juga KPK agar prosesnya diketahui secara jelas” sehingga Presiden menawarkan tindakan timbal balik, yaitu tindakan bahwa “Tim 9 tidak perlu melakukan penyelidikan (masuk) ke Polri dan KPK karena hal tersebut merupakan tindakan mengintervensi hukum”. Tindak tutur (7.2) mengandung ilokusi yang bertolak belakang dengan ilokusi mitra tutur, yaitu mitra tutur menginginkan rekomendasi tim 9 sebagai putusan hukum untuk menyelesaikan kekisruhan Polri dan KPK. Sementara itu Presiden Joko Widodo berpendapat tidak mesti demikian, tetapi harus mengikuti koridor hukum, ia menjadikan tim 9 hanya sebagai untuk tukar pikiran (karena memang rekomendasi tim 9 bertentangan dengan koridor hukum). Begitu juga dengan tuturan (7.3), mitra tutur sebagai representasi rakyat yang dimotori KMP yang secara tidak langsung menginginkan masalah KPK-Polri harus segera diselesaikan dan ditangani oleh presiden langsung serta mengimplisitkan bahwa dikotomi KMP-KIH itu masih ada. Namun, Presiden Joko Widodo menawarkan tindak tutur timbal balik bahwa KMP dan KIH sudah tidak ada.

8. Strategi Menimbulkan Persepsi Sejumlah Persamaan Penutur dan Mitra Tutur

Strategi menimbulkan persepsi sejumlah persamaan penutur dengan mitra tutur digunakan Presiden Joko Widodo dalam menanggapi permasalahan (a) hubungan DPR dan Pemerintah dan (b) persetujuan KMP-KIH, seperti yang terdapat dalam tindak tutur di bawah ini.

- (8.1) “Kita dengan pimpinan DPR sering ketemu. Artinya berbincang dalam rangka politik kebangsaan. *Saya meyakini beliau-beliau di dewan berpikir seperti ini.* Sekarang saya tidak ada masalah. Pembahasan APBN tiap hari di komisi, Banggar. Sekarang ini Alhamdulillah sangat senang karena hubungan kita sangat baik”.
- (8.2) “Kegiatan eksekutif sekarang sudah enggak keliatan ada gesekan. Artinya *semua partai sudah cair*, bekerja tentu saja di dewan budgeting, pengawasan, komunikasinya sangat baik”.
- (8.3) “*Sekarang sudah berpikir untuk negara.* Tidak ada pikiran KIH-KMP, ke depan kita sudah harus berjalan untuk negara dan prorakyat”.

Konstruksi *saya meyakini beliau-beliau di dewan berpikir seperti ini* pada data (8.1); konstruksi *semua partai sudah cair* pada data (8.2); dan konstruksi *sekarang sudah berpikir untuk negara* pada data (8.3) mengandung daya ilokusi menimbulkan persepsi sejumlah persamaan penutur dan mitra tutur.

9. Membuat Persepsi bahwa Penutur Memahami Keinginan Mitra Tutur

Strategi kesopanan yang kesepuluh yang digunakan Presiden Joko Widodo dalam tindak tutur untuk merespon masalah (a) hubungan DPR dan Pemerintah dan (b) kisruh Polri dan KPK, seperti yang terdapat pada tindak tutur di bawah ini.

- (9.1) “*Kita dengan pimpinan DPR sering ketemu.* Artinya berbincang dalam rangka politik kebangsaan. Saya meyakini beliau-beliau di dewan berpikir seperti ini. *Sekarang saya tidak ada masalah.* Pembahasan APBN tiap hari di komisi, Banggar. Sekarang ini Alhamdulillah sangat senang karena hubungan kita sangat baik”.
- (9.2) “Kegiatan eksekutif *sekarang sudah enggak keliatan ada gesekan.* Artinya semua partai sudah

cair, bekerja tentu saja di dewan budgeting, pengawasan, *komunikasinya sangat baik*".

(9.3) "*Jangan ada kriminalisasi, jangan ada yang di atas hukum. Polri dan KPK harus sesuai koridor hukum yang ada*".

Data (9.1) di atas mengandung daya ilokusi bahwa dulu antara DPR dengan Pemerintah memang ada masalah (karena ada konstruksi *sekarang tidak ada masalah*) tetapi sekarang tidak ada masalah (ada konstruksi *sekarang sering ketemu* (pada klausa awal) dan konstruksi *hubungan kita sangat baik* (pada klausa akhir)). Begitu juga dengan data (9.2). Data (9.3) mengandung ilokusi bahwa memang tidak boleh ada kriminalisasi tetapi Presiden Joko Widodo mempresuposisikan seolah-olah mitra tutur juga jangan ada yang di atas hukum.

10.Strategi Memperhatikan Minat, Keinginan, Kelakuan, atau Barang

Strategi ini ditemukan dalam merespon permasalahan mengenai persetujuan antara KMP-KIH, yang hanya ditemukan dalam tindak tutur: "*Sekarang sudah berpikir untuk negara. Tidak ada pikiran KIH-KMP, ke depan kita sudah harus berjalan untuk negara dan prorakyat*". Tindak tutur ini terutama pada klausa *sekarang sudah berpikir untuk negara* digunakan untuk meniadakan adanya persetujuan antara KMP-KIH dengan menyebutkan keinginan KMP (dan keinginan KIH) tersebut sehingga kedua kubu menjadi bagian satu sama lain.

Ada beberapa yang patut dicermati berkaitan dengan strategi kesopanan berbahasa Presiden Joko Widodo di atas, yaitu (1) penggunaan strategi kesopanan berbahasa; (2) daya ilokusi tindak tutur; (3) kecenderungan penggunaan strategi kesopanan berbahasa; dan (4) hubungan antara strategi kesopanan berbahasa.

Pertama, dari sebelas strategi kesopanan berbahasa, hanya *strategi membuat lelucon* yang tidak digunakan Presiden Joko Widodo dalam merespon persoalan sosial-politik bangsa. Hal ini

mungkin disebabkan topik-topik tersebut membutuhkan tindak tutur yang serius karena menyangkut kemaslahatan masyarakat dan bangsa.

Kedua, daya ilokusi tindak tutur. Suatu tindak tutur dapat mengandung beberapa daya ilokusi strategi kesopanan berbahasa lebih dari satu. Artinya, suatu tindak tutur dapat mengandung beberapa strategi kesopanan berbahasa sekaligus, yaitu menghindari pertentangan, menunjukkan kesamaan jati diri/kelompok, membuat penawaran dan janji, dan sebagainya. Dengan demikian, makin banyak daya ilokusi yang dimiliki suatu tindak tutur maka tindak tutur tersebut mengandung daya kesopanan yang kuat dan sebaliknya.

Ketiga, kecenderungan penggunaan strategi kesopanan. Apabila dikuantifikasi dengan melihat frekuensi penggunaan, jenis *strategi menghindari pertentangan* dan *strategi membuat penawaran dan janji dengan mitra tutur* merupakan jenis strategi yang paling sering digunakan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu sebesar 20%. Diikuti oleh *strategi menunjukkan kesamaan jati diri/kelompok* dan *strategi meningkatkan rasa ketertarikan, persetujuan, dan simpati* masing-masing 12%. Adapun strategi memberikan dan meminta alasan 5%, strategi memperhatikan minat, keinginan, kelakuan, atau barang 2%, sedangkan empat strategi lain masing-masing 7%. Tingginya penggunaan strategi menghindari pertentangan dengan mitra tutur yang diikuti oleh penggunaan strategi membuat penawaran dan janji mengingat tingginya dinamika perbedaan pendapat (tindak tutur) sekaligus menjaga stabilitas sosial-politik bangsa pascapilres.

Keempat, hubungan antara strategi kesopanan. Seperti yang dinyatakan pada butir kedua di atas, sebagian besar suatu tindak tutur mengandung daya ilokusi lebih dari satu atau beberapa strategi kesopanan berbahasa. Kaitan dengan hal tersebut dapat dikatakan tindak tutur yang mengandung daya ilokusi strategi mengurangi pertentangan dengan mitra tutur umumnya mengandung beberapa daya ilokusi atau beberapa strategi kesopanan. Hampir tidak ditemukan tindak tutur jenis ini yang

hanya mengandung satu daya ilokusi atau satu strategi kesopanan berbahasa. Strategi kesopanan berbahasa jenis ini hampir selalu/sering mengandung daya ilokusi jenis strategi kesopanan meningkatkan rasa ketertarikan, persetujuan, dan simpati, serta jenis strategi menimbulkan persepsi sejumlah persamaan penutur dan mitra tutur. Strategi menunjukkan kesamaan jati diri/kelompok selain memiliki hubungan yang erat dengan jenis strategi menghindari pertentangan juga memiliki hubungan dengan strategi meningkatkan rasa ketertarikan, persetujuan, dan simpati; dengan strategi membuat penawaran dan janji; dengan strategi melibatkan mitra tutur dalam suatu kegiatan tertentu; dan dengan strategi membuat persepsi bahwa penutur memahami keinginan mitra tutur. Strategi memberikan dan meminta alasan memiliki hubungan dengan strategi menawarkan suatu tindakan timbal balik. Namun demikian, terdapat sebagian tindak tutur yang mengandung strategi membuat penawaran dan janji yang tidak memiliki hubungan dengan strategi kesopanan berbahasa manapun.

C. SIMPULAN

Kaitan dengan strategi kesopanan Presiden Joko Widodo dalam merespons permasalahan sosial-politik bangsa dari perspektif teori Brown dan Levinson (1987) ada beberapa hal yang patut dikemukakan, yaitu sebagai berikut.

- a. Dari sebelas strategi kesopanan berbahasa yang disederhanakan dari teori Brown dan Levinson (1987), hanya strategi kesopanan membuat lelucon yang tidak digunakan. Hal ini berkaitan dengan topik yang dibicarakan yang tidak hanya mengancam muka penutur tetapi jenis topiknya yang menyangkut kestabilan sosial-politik masyarakat dan bangsa.
- b. Strategi kesopanan berbahasa jenis *menghindari pertentangan dengan mitra tutur* dan *membuat penawaran-janji* merupakan jenis strategi kesopanan yang sering digunakan oleh Presiden Joko Widodo masing-masing 20% sedangkan yang

- jarang digunakan adalah jenis *strategi memperhatikan minat, keinginan, kelakuan, atau barang* 2%.
- c. Jenis *strategi kesopanan mengurangi pertentangan dengan mitra tutur* memiliki hubungan dengan semua strategi kesopanan yang lain. Yang paling erat hubungannya dengan *strategi meningkatkan rasa ketertarikan, persetujuan, dan simpati mitra tutur*.
 - d. Penggunaan jenis strategi tertentu atau suatu strategi lebih dominan penggunaannya dibandingkan dengan jenis strategi lain semata-mata bukanlah upaya sadar penutur tetapi merupakan pengaruh lingkungan sosial-budaya yang melingkupi partisipan dalam tindak tutur. Namun, dominasi penggunaan jenis strategi berbahasa tertentu dapat dijadikan dasar untuk memahami pola karakter kepala negara dalam memecahkan permasalahan sosial-politik bangsa.
 - e. Perlu dilakukan studi secara lebih spesifik dan mendalam ihwal strategi kesopanan berbahasa Presiden Joko Widodo dalam merespons pemasalahan sosial-politik bangsa dengan menggunakan pendekatan yang lebih eklektik sehingga akan dapat diperoleh rumusan yang lebih komprehensif bagi studi pragmatik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunarwan, Asim. 1992. "Persepsi Kesantunan Direktif di dalam Bahasa Indonesia di antara Beberapa Etnik di Jakarta", dalam Kaswanti Purwo (ed.) Bahasa dan Budaya. Jakarta: PELBA 5.
- Gunarwan, Asim. 2005. "Beberapa Prinsip dalam Komunikasi Verbal: Tinjauan Sociolinguistik dan Pragmatik", dalam Pranowo (2005). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

- Gunarwan, Asim. 2007. "Implikatur dan Kesantunan Berbahasa: Beberapa Tilikan dari Sandiwara Ludruk". PELLBA 18. Jakarta: Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Atma Jaya.
- Leech, Geoffrey. 1983. *The Principles of Pragmatics*. London: Longman Group Limited
- Levinson, Stephen. 1983. *Pragmatics*. London: Cambridge University Press.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Aneka Teknik dan Strateginya*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Nadar, F.X. 2009. *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pranowo. 2008. "Kesantunan dalam Pemakaian Bahasa Indonesia". Laporan Hasil Penelitian. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Pranowo. 2009. *Berbahasa secara Santun*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardi, Kunjana. 2000. *Imperatif dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Rahardi, Kunjana. 2006. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardi, Kunjana. 2009. *Sosio pragmatik: Kajian Imperatif dalam Wadah Konteks Sosiokultural dan Konteks Situasionalnya*. Jakarta: Erlangga.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa, Pengantar Penulisan Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Yule, George. 2002. *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.